

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR NOMOR: 188.45- 784 TAHUN 2016

TENTANG

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2017

BUPATI BELITUNG TIMUR,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2017 yang terencana, terpadu dan sistematis, perlu menyusun Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2017;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan DPRD Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2017, perlu ditetapkan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2017;
- c. bahwa Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
- 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4421);
- 3. Undang-UndangNomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambaran Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2017.

Membentuk Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2017.

KEDUA

KESATU

Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KETIGA

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar

pada tanggal & Desember 2016

BUPATI BELITUNG TIMUR,

YUSLIH IHZA

LAMPIRAN: KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR NOMOR: 188.45-784 TAHUN 2016 TANGGAL 8 DESEMBER 2016

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2017

I. RANCANGAN PERATURAN DAERAH

	1			STAT	rus		DI	SERTAI	UNIT/	
No	JENIS	TENTANG	materi pokok		UBAH	PELAKSANAAN	NA	Penjelasan atau Keterangan	instansi Terkait	TARGET PENYAMPAIAN
1	2	3	4	5		6		7	8	9
1.	Perda	Pengawasan dan Pengendalian Terhadap Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol	Mencabut Perda Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pengawasan dan Pengendalian Terhadap Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol Perubahan perijinan, tempat penjualan dan sanksi	▼		permendag Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol permendag Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Permendag Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol	7		Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kab. Belitung Timur/ Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan	Masa Persidangan I (1 Januari-30 April 2017)
2.	Perda	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Perijinan Tertentu	Tempat Penjualan dan Besaran Tarif Retribusi Minuman Beralkohol	-	4	UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah		1	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kab. Belitung Timur/ Dinas Penanaman Modal, Pelayanan	Masa Persidangan I (1 Januari-30 April 2017)

)

3.	Perda	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum	Besaran Tarif Retribusi Tera/Tera Ulang		1	UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah		 Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kab. Belitung Timur/ Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan	Masa Persidangan I (1 Januari-30 April 2017)
4	Perda	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan administrasi Kependudukan	Administrasi Kependudukan		1	UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan	4	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Belitung Timur/ Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Belitung Timur	Masa Persidangan I (1 Januari-30 April 2017)
5	. Perda	Pengelolaan Air Limbah Domestik Kabupaten Belitung Timur		1		-	1	Cipta Karya dan Perumahan Rakyat Kab. Belitung Timur/ Dinas Lingkungan Hidup Kab. Belitung Timur	Masa Persidangan I (1 Januari-30 April 2017)

Masa Persidangan I Bagian Hukum Menteri Keputusan Pencabutan Perda Daerah Peraturan Pencabutan Perda (1 Januari-30 April Setda. Kab. Dalam Negeri tentang Kabupaten Belitung Timur Nomor 8 2017) Belitung Timur/ Peraturan Pencabutan Tahun 2011 tentang Pengelolaan Air Bidang Daerah Nomor 8 Tahun Tanah Administrasi 2011 tentang Pengelolaan Umum Setda. Air Tanah Kab. Belitung Timur Masa Persidangan I Bagian Hukum Menteri Keputusan Pencabutan Perda Daerah Pencabutan Peraturan Perda (1 Januari-30 April Setda. Kab. tentang Dalam Negeri Kabupaten Belitung Timur Nomor 8 2017) Belitung Timur/ Pencabutan Peraturan Tahun 2012 tentang Kewenangan Bidang Daerah Nomor 8 Tahun Kabupaten Belitung Pemerintah Administrasi tentang 2012 Timur Umum Setda. Kewenangan Pemerintah Kab. Belitung Belitung Kabupaten Timur Timur Masa Persidangan I Bagian Hukum Menteri Keputusan Perubahan Atas Peraturan Daerah Perubahan Perda 8. Perda (1 Januari-30 April Setda, Kab. Dalam Negeri tentang Kabupaten Belitung Timur Nomor 2017) Belitung Timur/ Peraturan Pencabutan 10 Tahun 2011 tentang Sistem Bidang Daerah Nomor 10 Tahun Penyelenggaraan Pendidikan Administrasi 2011 tentang Pencabutan Umum Setda. Peraturan sebagian Kab. Belitung Kabupaten Daerah Timur **Belitung Timur Nomor 10** 2011 tentang Tahun Sistem Penyelenggaraan Pendidikan Masa Persidangan I DPRD Kab. UU Nomor 26 Tahun Perubahan Perda Perubahan Atas Peraturan Daerah Perda 9. (1 Januari-30 April **Belitung Timur** 2007 tentang Penataan Kabupaten Belitung Timur Nomor 2017) Ruang 13 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2014-2034

10. Perda Perlindungan Tenaga Kerja Lokal Perlindungan Nomor 13 Tahun DPRD Kab. UU Masa Persidangan I tenaga kerja lokal 2003 **Belitung Timur** tentang (1 Januari-30 April Ketenagakerjaan 2017) 11. Perda Penanggulangan Kenakalan Remaja Penanggulangan DPRD Kab. Masa Persidangan I kenakalan remaja **Belitung Timur** (1 Januari-30 April 2017) 12. Perda Perubahan Atas Peraturan Daerah ٧ Penambahan UU Nomor 28 Tahun Dinas Kelautan Masa Persidangan II Objek 2009 Nomor 3 Tahun 2012 tentang dan Pajak dan Perikanan tentang (1 Mei-30 Agustus Retribusi Jasa Usaha Tarif Perubahan Daerah dan Retribusi Kab. Belitung 2017) Retribusi Daerah Timur Perda 13. Penetapan Hari Jadi Kota Mangar √ Penetapan hari Kantor Masa Persidangan II iadi Kota Manggar Perpustakaan (1 Mei-30 Agustus dan Arsip 2017) Daerah/Dinas Perpustakaan Kab. Belitung Timur Perubahan Peraturan Daerah Nomor 14. Perda Perubahan Pasal 8 - UU No 40 Tahun 2007 Masa Persidangan II Bagian Ekbang 7 Tahun 2013 tentang ayat (2), (1 Mei-30 Agustus bahwa Setda, Kab. Pembentukan Badan Usaha Milik dalam Beltim/Bidang 2017) Daerah PT. Pembangunan Belitung melaksanakan Ekonomi dan Timur kerjasama BUMD Pembanggunan PT. Pembangunan Setda Kab. Beltim Belitung Timur diwajibkan tidak untuk melalui persetujuan DPRD. 15. Perda Perlindungan Sosial Suku Sawang Perlindungan DPRD Kab. Masa Persidangan II sosial **Belitung Timur** (1 Mei-30 Agustus suku 2017) sawang 16. Perda Jam belajar Masyarakat DPRD Kab. Masa Persidangan II Jam belajar **Belitung Timur** (1 Mei-30 Agustus masyarakat 2017)

			3			<u></u>			7	
17.	Perda	Tempat Pelelangan Ikan	Pengelolaan Sumber Daya Ikan	√		UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	7		Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Belitung Timur	Masa Persidangan III (1 September-31 Desember 2017)
18.	Perda	Desa	Penyelenggaraan Desa dan BPD	1	i i	UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa	1	1	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kab. Beltim/ Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Beltim	Masa Persidangan III (1 September-31 Desember 2017)
19.	Perda	Rencana Detail Tata Ruang Pusat Kegiatan Lokal Kelapa Kampit	RDTR PKL Kelapa Kampit	7		Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Daerah	1		Bappeda/ Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Beltim	Masa Persidangan III (1 September-31 Desember 2017)
20.	Perda	Rencana Induk Pembangunan Pertanian	Pembangunan Pertanian	7		UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang RPJMN	1		Bappeda/ Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Beltim	Masa Persidangan III (1 September-31 Desember 2017)
21.	Perda	Rencana Induk Perikanan	Penyusunan Masterplan Perikanan meliputi Perikanan Tangkap dan Budidaya	1		UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan	1		Bappeda/ Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Beltim	Masa Persidangan III (1 September-31 Desember 2017)

22. Perda Induk UU Nomor 3 Tahun 2014 Rencana Pembangunan RIPIDA mencakup Bappeda/ Dinas Masa Persidangan III Industri Daerah (RIPIDA) (1 September-31 tentang Perindustrian Pekerjaan Umum sasaran dan Penataan Desember 2017) pembangunan industri. Ruang Kab. pembangunan **Beltim** sumber daya industri, pemberdayaan industri. perwilayahan industri serta dan sarana prasarana industri 23. Perda Kepariwisataan V UU Nomor 10 Tahun 2009 Masa Persidangan III Pembangunan Dinas Kepariwisataan tentang Kepariwisataan Kebudayaan dan (1 September-31 Desember 2017) Pariwisata 24. Perda Pelestarian Budaya Daerah Dinas Masa Persidangan III Lembaga Adat Melayu Belitong Kebudayaan dan (1 September-31 Pariwisata Desember 2017) 25. Rencana Detail Tata Ruang Pusat RDTR PKL V Perda Undang-Undang Nomor 26 Bappeda/ Dinas Masa Persidangan III 2007 Kegiatan Lokal Gantung Gantung Tahun tentang Pekerjaan Umum (1 September-31 Penataan Ruang Daerah dan Penataan Desember 2017) Ruang Kab. Beltim

II. RAPERDA KUMULATIF TERBUKA

	TARGET	PENYAMPAIAN		6	Masa Persidangan II	(1 Mei-30 Agustus	_												Masa Persidangan II	(1 Mei-30 Agustus	<u></u>									
TTMTP/F /	/TYNO	INSTANSI PI		8	DPPKAD Mas	-	(2017)					•							DPPKAD Ma	[1]	2017)		•							
DISERTAI		Fenjeiasan atau	Keterangan	7	٨								-		٠				7											
	_	NA				13		ng -	an			21	ng	tas	13	gu	nan			13	gur	ıgı		 14	ang	tas	13	gue	aan	-
		PELAKSANAAN		9		- Dermendagri Nomor 13	3	200	Pedoman Pengelolaan	Keuangan Daerah	1	Permendagri Nomor 21	Tahun 2011 tentang	Perubahan Kedua Atas	Permendagri Nomor 13	Tahun 2006 tentang	-	Keuangan Daerah		Permendagri Nomor 13	Tahun 2006 tentang	Pedoman Pengelolaan	Keuangan Daerah	Fermendagn Nomo	Tahun 2011 tentang	Perubahan Kedua A	Permendagri Nomor 13	Tahun 2006 tenta	Pedoman Pengelok	Keuangan Daerah
MIS	3	UBAH		. 2															7											
STATIS		BARU				>																		 						
		MATERI POKOK		4		Hasil LKPD Audit TA.	2016												Domitohon Angerton	Pendanatan Relania	Daerah (PAPBD)	DPPA-SKPD								
		TENTANG		,	3	Pertanggung	jawaban APBD	TA.2016												rerubanan	TOP OF THE PORT OF								*	
		JENIS			2	Perda	_												,	Perda								_		
		No		,	-	<u>-</u> i														ci					_					

Masa Persidangan III	Michael Carried Control	(I September-31	Desember 2017)	Describer 2011)
U DDDVAD	מראי ז ז מ			
	~			
	Anggaran Pendapatan	(100A) Jan-19 : 1 a		DPA-SKPD
	APBD TA.2018			
	Denda APBD T	<		

BUPATI BRLITUNG TIMUR,